

POSISI ULAMA DALAM PEMERINTAHAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

Sholeh Fikri

Lecturer of Da'wa and Communication Faculty at IAIN Padangsidimpuan
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Email: sholehfikri@gmail.com

Abstract

This study aimed to get an overview of the position of *ulama* in the government of Padangsidimpuan City. The position of *ulama* must be considered by the government, because they are the potential elements of people who did not all people have it. One thing to remembered is *ulama* as the partner of government. This is a descriptive research in which collecting the data through observation and interviews with *ulama* and Muslim scholars in the this city. The results indicated that the government had less attention to religious activity, except that routines such as MTQ, and activities during Ramadhan. Public welfare activities are not yet visible. The government's attention to the education sector which is a symbol of the city Padangsidimpuan also goes unnoticed. The roles of *ulama* seems still less in contributing to the development of this country, and the communication is not created because of needed. Because the minim roles, *ulama* maynot give the effect to the government; even, the government restraints from them. The government just stay closer to *ulama* at the certain time, or if they have powerful effects in the society. Moreover, the way to communicate between *ulama* and societies is still traditionally, it is not in modern and accurate communication. It makes government didnot give big attention and appreciation to them; because they also have small function and contribution to the government.

Keywords: *ulama*, Government of Padangsidimpuan City, contribution of *ulama*.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang posisi ulama dalam pemerintahan di Kota Padangsidimpuan. Mengingat posisi ulama adalah posisi yang harus dipertimbangkan oleh kalangan pemerintah sebagai bagian dari unsur masyarakat yang memiliki potensi yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan dan ulama adalah mitra pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan perolehan data melalui observasi dan wawancara terhadap ulama dan cendekiawan muslim yang ada di Kota Padangsidimpuan. Hasil penelitian mendapatkan bahwa gaya pemerintahan Kota Padangsidimpuan kurang memperhatikan kegiatan keagamaan, kecuali yang rutinitas seperti MTQ, dan kegiatan pada bulan Ramadhan. Kegiatan mensejahterakan masyarakat pun belum terlihat. Perhatian pemerintah kepada sector pendidikan

yang merupakan symbol kota Padangsidempuan juga luput dari perhatian. Peran ulama juga terasa masih kecil dalam memberikan kontribusi untuk pembangunan, komunikasi yang terjalin adalah komunikasi satu arah belum tercipta saling membutuhkan. Karena peran ulama masih kecil sehingga ulama belum bisa memberikan warna ulama kepada pemerintah. Pemerintah menjauh dari ulama. Pemerintah mendekat kepada ulama dalam waktu-waktu tertentu, dan itupun jika ulama tersebut besar pengaruhnya di masyarakat. Saluran komunikasi antara ulama dan masyarakat masih tradisional belum dalam bentuk yang modern dan akurat, sehingga banyak yang tidak dapat diserap pemerintah akhirnya pemerintah kecil memberikan penghargaan kepada ulama karena kecil pula kontribusi ulama terhadap pemerintah.

Kata Kunci: Ulama, Pemerintahan Kota Padangsidempuan, dan kontribusi ulama.

PENDAHULUAN

Ulama secara history dikenal dengan orang yang menekuni bidang agama, walaupun secara bahasa ulama berasal dari kata-kata 'alim artinya orang yang pandai, orang yang memiliki ilmu yang banyak baik itu ilmu agama maupun ilmu yang bersifat umum, namun masyarakat mengenalnya sebagai orang yang mendalami dan menekuni ilmu-ilmu agama.

Kedekatan seseorang dengan ajaran-ajaran agama cenderung dipengaruhi oleh norma-norma yang ada dalam ajaran agama tersebut, seperti nilai kejujuran, kesederhanaan, rendah hati, tidak sombong, dermawan, patuh terhadap aturan-aturan agama seperti menjahui prilaku-prilaku yang haram, aktif beribadah mahdhah seperti salat, puasa maupun kegiatan ibadah non mahdhah seperti bersedekah, membantu meringankan beban orang yang lemah, menolong orang lain dan lain sebagainya.

Dalam ajaran Islam ulama memang memiliki kedudukan tinggi dan peran penting dalam kehidupan umat, karena mereka pewaris Nabi. Secara garis besar peran ini berupa tugas-tugas pencerahan bagi umat.¹ Sebagaimana disebutkan dalam Q.s. al-Jumu'ah: 2,

Dialah mengutus kepada kaum buta huruf seorang Rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayat –Nya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

Dalam bahasa lain peran ini juga disebut *amar ma'ruf nahi mungkar* yang rinciannya meliputi tugas untuk: 1) menyebarkan dan memertahankan ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama, 2) melakukan kontrol dalam masyarakat, 3) memecahkan problem yang terjadi dalam masyarakat dan 4) menjadi agen perubahan sosial masyarakat.

Sebagai implementasi dari tugas di atas, ulama menjadi sumber rujukan dalam masalah keilmuan agama. Ulama menjadi tempat bertanya tentang masalah yang dihadapi masyarakat tentang agama, khususnya dalam bidang hukum agama baik dalam tataran ilmu Fiqh, tentang Tauhid maupun tentang pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari.

¹Nanang Tahqiq (ed), *Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.189.

Pandangan dan pendapat seorang ulama akan dijadikan landasan hukum bagi kehidupan masyarakat, dan pendapat ulama tersebut akan dipedomani selamanya. Basofi Sudirman menjelaskan bahwa, ulama dihormati karena kemuliaan ilmunya sebagai *warasatul ambiya'*, dicintai karena kedekatannya terhadap umat, disegani karena kejujuran, ketegasan dan kebijaksanaannya dalam membimbing moral masyarakat. Boleh juga dikatakan bahwa ulama merupakan sebuah sosok yang sarat dengan akal (ilmu) dan nurani.²

Posisi ulama yang sangat mulia ini merupakan anugerah Tuhan yang tidak diberikan kepada semua orang, dia hanya menjadi milik orang-orang tertentu saja. Jika mereka menjadi manusia yang dipilih oleh Allah, maka semestinya manusia juga sangat pantas untuk memilih mereka menjadi orang pilihannya untuk berbagi rasa, mengadukan nasibnya bahkan meminta pendapatnya untuk melakukan segala hal, namun apakah ulama yang ada di kota Padangsidempuan telah diposisikan dengan tepat oleh pemerintah dalam rangka membangun. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema "Posisi Ulama dalam Pemerintahan Kota Padangsidempuan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa posisi ulama dalam kancah pemerintahan di Kota Padangsidempuan?
2. Apakah Ulama dapat memberikan warna keulamaan dalam pemerintahan di Kota Padangsidempuan ?
3. Apa kiat-kiat yang telah dilakukan Ulama dalam meluruskan arah pemerintahn di Kota Padangsidempuan ?

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui posisi Ulama Kota Padangsidempuan dalam panggung pemerintahan.
2. Untuk mengetahui warna pemerintahan di Kota Padangsidempuan.
3. Untuk mengetahui kiat-kiat Ulama dalam meluruskan arah pemerintahan di Kota Padangsidempuan.

KAJIAN TEORI

Posisi Ulama dalam Pemerintahan

Baik Ulama maupun Sarjana, keduanya bukanlah kasta penguasa (ruling class) dalam negara. Al-Ghazali seorang peminat ilmu yang menjunjung pengetahuan setinggi-tingginya, tetapi tidaklah pernah ia memikirkan mangangkat derajat ahli-ahli pengetahuan memonopoli kekuasaan sebagai kasta yang berkuasa. Kedudukan mereka di dalam soal negara, terutama mengenai kekuasaan pemerintahan, sama saja dengan warga-negara lainnya sebagai rakyat. Rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, untuk menetapkan segala sesuatunya, dan suara rakyat merupakan hakim tertinggi dan terakhir di dalam

² S.Sinansari ecip (ed.), *NU Khittah dan Godaan Politik*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 42.

mengambil keputusan. Tidak ada prioritas istimewa yang dipersembahkan kepada suatu golongan tertentu, kalau rakyat tidak menyetujuinya.

Di dalam hal ini, sama saja dalam pandangan Al-Ghazali apakah orangnya ahli ilmu-ilmu agama yang dinamakan “ulama” ataukah ahli ilmu-ilmu umum yang dinamakan “sarjana”.

Negara akhlak yang ditujunya bukanlah suatu negara *teokrasi*, di mana secara hierarchis kekuasaan pemerintahan dipegang oleh kaum pendeta (ulama). Dan bukan pula suatu negara *Ochlokrasi*, di mana kekuasaan dimonopoli oleh kelompok kaum sarjana.

Negara akhlak adalah negara kerakyatan, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan seluruh politik negara dan pekerjaan pemerintah diliputi oleh semangat akhlak dan jiwa.

Bahkan dalam banyak tulisannya, Al-Ghazali menganjurkan supaya Ulama bersikap “*uzlah*” terhadap suatu pemerintahan yang zalim, yaitu menjauhkan diri dan jangan ikut campur di dalam apa saja pekerjaan pemerintahan. Kalau dalam negara teokrasi, keahlian dalam ilmu-ilmu agama atau tegasnya kedudukan keagamaan menempatkan orangnya dalam pimpinan negara dan pemerintahan, maka sebaliknya dalam pendapat Al-Ghazali, justru keahlian dalam agama itulah menyebabkan seorang harus berhati-hati dan waspada terhadap jabatan kenegaraan. Dinasehatkannya janganlah sampai menjadi “Ulama duniawi” atau “*Ulama es Su’i*”, yang memburu pangkat dan kesenangan duniawi dengan memperkedok agama.

Pekerjaan besar memelihara ideologi negara dan melaksanakan politik keadilan, bukanlah hanya menjadi tanggung jawab kaum politisi dan diplomat saja, tetapi adalah menjadi tanggung jawab seluruh rakyat. Di dalam hal ini, terutama sangat diserukan kerjasama dari kaum Ulama yang mengerti lebih dalam akan ideologi Islam dan dari kaum sarjana yang memegang obor ilmu pengetahuan dan peradaban.

Al-Ghazali sangat merindukan keseragaman kerja di zaman negara Islam yang pertama, di zaman Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin. Segala golongan rakyat memberikan sumbangan menurut bakat dan kemampuannya masing-masing, terutama golongan ahli-ahli ilmu, umum dan agama. Pemerintah di dalam segala sikapnya mendapat sokongan sepenuhnya dari para Ulama dan para sarjana, sehingga negara Islam mencapai suatu kemenangan gilang gemilang di dalam masa singkat, yang tidak ada bandingannya di dalam sejarah.

Tetapi, alangkah besarnya sesalannya memperhatikan kerajaan Abbasiyah di zamannya, yaitu 4 abad lebih dibelakang. Nabi dan Khulafa’ur Rasyidin, sudah jauh menyimpang dari ideologi Islam dan politik keadilan. Segala Ulama dan Sarjana tidak lagi memberikan bantuannya, menjauhkan diri dan memandang jijik urusan negara sebagai barang haram yang tidak boleh didekati.

Sebab itu, sewaktu dia masih di Baghdad berada di tengah dan di pusat pemerintahan Sulthan Malik Syah dengan Perdana Menteri Nizamul Mulk yang adil dan bijaksana, maka al-Ghazali mengundang segenap Ulama dan Sarjana supaya bekerjasama dengan sebaik-baiknya untuk menegakkan politik keadilan dan merencanakan pembangunan semesta, dengan para politik dan kaum diplomat.

Anjuran kerjasama ini sungguh sangatlah penting artinya bagi suatu negara yang berideologi, baik untuk kepentingan ideologinya sendiri, maupun untuk pembangunan seluruhnya. Kaum Ulama di dalam negara Islam perlu membantu untuk menegakkan dan mengisi ideologi, selanjutnya untuk pembangunan mental/spiritual. Dan kaum Sarjana harus membantu untuk membangun di lapangan ilmiah dan segala lapangan kemasyarakatan. Jika keduanya bekerjasama dengan kaum politisi dan diplomat di dalam negara, pastilah negara menjadi makmur dan dicintai rakyat.

Di dalam suatu pemerintah yang zalim ada 3 persoalan yang dihadapi oleh Ulama dan Sarjana:

- a. *Janganlah menduduki jabatan pemerintahan.* Ulama dan Sarjana haruslah bersikap tegas dan jantan, ialah menolak setiap jabatan yang ditawarkan kepadanya, karena dengan menerima jabatan itu selain dari berarti menundukkan diri kepada politik kezaliman, tetapi juga ikut serta memperkuat kedudukan pemerintah yang zalim.
- b. *Janganlah menerima bantuan pemerintah berupa apapun.* Dikemukakannya bahwa ada dua pendapat dari dahulu: membolehkan menerima bantuan itu, yang dipelopori oleh sahabat Nabi, Abu Hurairah; dan kedua melarangnya, yang dianut oleh kebanyakan Imam.
- c. *Jangan aktif mencampuri urusan-urusan politik dan masyarakat.* Anjuran yang terakhir inilah yang menggelisahkan beberapa pengecamnya, karena melumpuhkan semangat berjuang menegakkan kalimah kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.

Selanjutnya, tugas Ulama di masyarakat sangat strategis, di pemerintahan pula tugas ulama juga sangat diperhitungkan, karena tugas ulama memiliki tugas ganda. Tugas ganda seperti *tabligh*, *tabyin*, *tahkim* dan *uswah*.³ Apakah keempat tugas pokok ini ulama lakukan terhadap perjalanan pemerintahan di Kota Padangsidempuan. Dalam rangka memenuhi amanah kenabian, terutama dalam kaitannya dengan peran *tabligh* ulama berkewajiban untuk menyampaikan wahyu, baik al-Qur'an maupun al-Hadits kepada umat. Peran ini termanifestasikan secara luas dalam berbagai aktifitas dakwah dan tarbiyah. Peran *tabyin* menjadikan ulama memiliki otoritas untuk menafsirkan berbagai dogma agama sesuai dengan semangat Islam dan zaman kemudian mensosialisasikannya pada umat secara

³Sri Suyanta, *Pola Hubungan Ulama dan Umara* (Kajian Tentang Pasangsurut Peran Ulama Aceh), Disertasi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2005), hlm.187.

proporsional. Berbagai interpretasi dan karya ilmiah serta pengembangan selanjutnya yang dihasilkan oleh ulama, bisa dipahami dalam rangka mengemban amanah kenabian.

Di samping itu karena ia menjadi rujukan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi umat Islam, maka ulama dengan peran *tahkim*-nya berkewajiban berijtihad dan memberikan keputusan hukum (fatwa) terhadap persoalan yang dihadapi oleh umat, baik diminta maupun tidak. Dalam mengemban peran *tahkim* ini, ulama tidak saja harus mengkaji berbagai kitab yang telah dirumuskan oleh para ulama sebelumnya, tetapi untuk dapat menyelesaikan berbagai kasus yang dihadapi oleh umat, ulama harus menyelesaikannya secara kontekstual dengan memperhatikan kondisi yang terjadi di saat keputusan dikeluarkan. Ulama dituntut untuk dapat mengembangkan prinsip-prinsip yang ada di dalam al-Qur'an untuk menjawab tantangan zaman yang selalu berubah dan semakin kompleks, baik di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya. Dan dalam kesehariannya, baik dalam kehidupan individu, keluarga maupun sosial kemasyarakatan, ulama harus mampu menjalankan peran *uswah* (public figur) bagi umat. Konsekwensi dari peran berat ini, kata Quraish Shihab, ulama harus menjadi pemimpin dalam masyarakat.⁴

Di dalam bukunya " *Al Imla ala isykal el ihya'* ", Al-Ghazali membagi para Ulama kepada tiga golongan:

- a). Ulama *Hujjah*, ialah ahli ilmu agama yang mengutamakan perintah Tuhan dan bekerja menurut jalan yang benar.
- b). Ulama *Hajjaj*, ialah ahli ilmu agama yang berjuang menegakkan agama Tuhan, berdiri di baris depan memimpin umat mempertahankan politik keadilan, bagaikan bintang terang yang menyinari jalan dan memimpin perjuangan.
- c). Ulama *mahjuj*, ialah ahli ilmu agama yang memperhamba diri kepada duniawi, menjadi budaknya kaum penguasa yang menjalankan politik kezaliman

Terhadap golongan ketiga diperingatkannya bahwa celakalah rakyat yang mengikut mereka, baik dunia maupun agama. Mereka inilah yang dinamakannya "*ulama al-su'i'*", Ulama jahat yang menjual agamanya dengan jabatan atau keuntungan duniawi yang sedikit. Rusaknya rakyat karena rusaknya Ulama; dan kalau bukanlah karena Hakim-hakim yang jahat dan Ulama-ulama yang jahat, akan sedikitlah terjadi kerusakan penguasa (dan rakyat).

Adapun Ulama yang pertama dan kedua, adalah Ulama yang tetap konsekuen pada tugasnya sebagai pemegang amanah Allah, penjaga waris Nabi-Nabi dan penegak politik kebenaran. Jika Ulama Hujjaj tetap konsekuen pada pendiriannya, maka Ulama Hujjaj tampil ke depan sebagai pemimpin dari mereka untuk berjuang menentang politik kedzaliman dan menegakkan politik keadilan. Bahagialah umat yang mengikuti mereka,

⁴Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm.385

setiap perjuangan mereka dianggap jihad dan kematian mereka dalam perjuangan dipandang mati Syahid yang diridhai Tuhan.⁵

Modernisasi kehidupan sosial, merupakan faktor pembentuk budaya dan kepribadian baru di kalangan umat. Perkembangan pendidikan modern yang berlangsung cepat, sejak akhir masa kolonialisme Belanda, sebagai pelaksana politik-etis dan percepatan teknologi komunikasi-informasi, telah mendorong terbentuknya formasi dan struktur baru dalam tata hubungan umat. Dalam hal lain, telah mempercepat pembentukan elit sosial baru di kalangan umat.

Pendidikan modern dan rekayasa sosial yang cepat, memiliki daya dorong yang kuat bagi umat dalam memilih lapangan pekerjaan sesuai dengan pendidikan mereka. Di samping itu, semakin hilangnya tanah pertanian merupakan faktor lain yang tidak kalah pentingnya.

Perkembangan kehidupan modern tersebut, mendorong spesialisasi pekerjaan dan memperlemah kemampuan personal dan menjadikan seseorang semakin tergantung. Gejala tersebut demikian pula perkembangan teknologi komunikasi-informasi, mempercepat terdesaknya ulama tradisional dalam proses sosialisasi ajaran Islam.

Modernisasi pendidikan Islam, di samping melahirkan generasi baru intelektual dan akademis dengan wawasan pemikiran dan hubungan yang luas, juga secara berangsur menggeser posisi sosial ulama tradisional. Perkembangan teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk usaha sosialisasi Islam secara modern melalui media penerbitan, radio dan televisi.

Faktor-faktor di atas, secara bersama semakin memperkecil peranan ulama dalam berbagai bidang kehidupan sosial. Pembaharuan pendidikan yang melahirkan elit baru sebagaimana telah diuraikan, mendorong diferensiasi sosial semakin tajam.⁶

Posisi ulama sebagai pengemban sosialisasi Islam, secara tradisional memegang peranan utama perkembangan sistem dan struktur sosial dan kepribadian umat. Juga penganjur Islam dan elit umat yang dijadikan pengikut 50,32% adalah pegawai pemerintah, kondisi tersebut merupakan sesuatu petunjuk berharga apabila seluruh partai Islam pada masa orde baru tidak akan pernah mengembalikan posisi umat sebagaimana tahun 1955. Sikap adalah kepentingan dan selanjutnya pekerjaan akan menentukan sikap sosial seseorang.

Modernisasi birokrasi pemerintahan orde baru, telah menempatkan pegawai negeri sebagai tulang punggung pemerintah bersama ABRI. Dan selanjutnya kebijaksanaan politik Orde Baru, mamaksa pegawai-pegawai pemerintah tersebut untuk tidak bersikap mendua dalam politik. Dengan demikian, bagi pegawai negeri yang ulama dan muballigh serta

⁵Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral: Menurut Imam Al-Ghazali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm:121-131

⁶Abdul Munir Mulkhan, *Perubahan perilaku politik dan Polarisasi Ummat Islam*, (Jakarta: Rajawali pers, 1989), hlm: 168-170

penganjur Islam lainnya, tidak ada pilihan lain, kecuali mendukung sikap politik penguasa yang sedang mencari pendukung di kalangan umat yang berada pada lapisan terbawah struktur sosial Islam. Sebagaimana telah diutarakan bahwa pendidikan modern merupakan dorongan yang kuat terdesaknya ulama tradisional.⁷

Kegagalan percobaan kudeta PKI pada 30 september 1965 membawa konsekuensi pemerintahan Orde Lama tumbang dan muncul pemerintahan Orde Baru. Keadaan tersebut menjadikan umat Islam berhadapan dengan pemerintah, sehingga pada umumnya para ulama, tokoh agama dan intelektual Muslim mengambil sikap cukup kritis dan bahkan oposisi terhadap pemerintah.

Pada dasawarsa ini umumnya fatwa-fatwa ulama mewajibkan umat Islam untuk memilih partai Islam dalam pemilu. Hal ini mengakibatkan ketegangan antara umat Islam dengan pemerintah. Di satu sisi, pemerintah membatasi aktivitas dakwah Islam, termasuk memberlakukan keharusan ada surat izin dari pejabat setempat bagi seorang da'i sebelum menyampaikan dakwah. Di segi lain, banyak dari tokoh Islam yang mengkritik pemerintah dalam ceramah atau khotbah-khotbah mereka. Ketegangan ini menjadikan komunikasi antara umat Islam dengan pemerintah kurang lancar, sehingga muncul tuduhan dari kalangan pemerintah, bahwa umat Islam anti-pancasila, anti-pembangunan dan anti-modernisasi. Sebaliknya, muncul pula tuduhan dari kalangan umat Islam, bahwa pemerintah cenderung sekular dan anti-Islam.

Respon Pemerintah Terhadap Ulama

Melihat persoalan tersebut, pemerintahpun berusaha mengatasinya, antara lain, dengan berinisiatif untuk membentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1975. Organisasi baru ini berfungsi: (1) memberikan fatwa atau nasihat tentang masalah-masalah agama dan masalah-masalah sosial, (2) meningkatkan persaudaraan (ukhuwah) Islam, serta memelihara sikap toleran dengan kelompok-kelompok agama lain, (3) mewakili umat Islam dalam komunikasi dengan pemeluk agama lain, dan (4) bertindak sebagai media komunikasi antara ulama dengan pemerintah dan untuk menterjemahkan kebijakan pemerintah tentang pembangunan, agar dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Dengan upaya tersebut pada awal tahun 1980-an, hubungan saling curiga (*mutual distrust*) antara umat Islam dengan pemerintah mulai redup dan berganti menjadi hubungan saling memahami (*mutual understanding*), terutama dengan penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya azas bagi organisasi massa disertai legitimasi keagamaan oleh sebagian ulama. Sebagian lain tampak menerimanya dengan keterpaksaan, karena mereka tidak memiliki kekuatan tawar-menawar lagi berhadapan dengan keinginan pemerintah. Kebijakan pemerintah terhadap Islam menampakkan perubahan (revisi) yang nyata sejak lahir tahun

⁷ *Ibid*

1980-an, sebuah kebijakan yang lebih bersikap akomodatif terhadap Islam, sehingga hubungan antara pemerintah dengan umat Islam sejak ini bisa disebut sebagai “masa bulan madu” (*honeymoon period*). Politik akomodasi pemerintah ini di sisi lain menimbulkan semakin banyak ulama dan tokoh-tokoh Islam bersikap akomodatif dan bahkan terkooptasi oleh kekuasaan untuk mempertahankan *status quo*, meskipun mereka berdalih, bahwa mereka tetap melakukan *amr ma'ruf nahy munkar* dengan jalan bijaksana. Hanya sedikit dari mereka tetap kritis terhadap kebijakan dan perilaku pemerintah.

Di samping faktor kebijakan pemerintah tersebut, penyusutan peran ulama dalam bidang-bidang tertentu juga disebabkan oleh faktor internal umat sendiri, yakni karena semakin banyak kalangan santri yang berpolitik (*political society*) jumlah ulama mengalami pengurangan, karena di samping ada kebijakan depolitisasi Islam, kepengurusan partai politik (Islam) sudah banyak diisi oleh tokoh-tokoh santri non-ulama. Demikian pula dalam penyelenggara PA (Peradilan Agama), sudah amat sedikit jumlah ulama (yang hanya berlatar belakang pendidikan tradisional) menjadi hakim agama, karena ada persyaratan hakim agama harus sarjana hukum/syari'ah. Hal ini diperburuk dengan masih rendah wawasan sebagian besar ulama tentang proses politik dan penyelenggaraan negara, sehingga mereka kurang bisa berperan banyak dalam proses politik ini, terutama dalam hal proses pengambilan kebijakan publik (*public policy making*) dan proses demokrasi.

Meski demikian kiprah ulama di bidang politik ini secara umum masih cukup berarti. Banyak dari mereka terlibat meski secara terbatas dalam proses pengambilan kebijakan politik dan dalam hal sosialisasi hukum dengan pendekatan keagamaan. Di antara mereka masih ada yang terlibat di partai politik PPP dan Golkar serta menjadi anggota parlemen. Demikian pula banyak dari mereka mampu mengemukakan visi mereka tentang kondisi ideal masyarakat Islam serta bangsa dan negara Indonesia modern, misalnya mengenai persatuan bangsa, pembangunan sumber daya manusia, sistem politik demokratis, kadilan sosial dan sebagainya. Juga banyak dari mereka berani melakukan kontrol atau kritik terhadap kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kemaslahatan umum. Sayang pemerintah Orde Baru memang melibatkan mereka hanya dalam pelaksanaan kebijakan atau dalam mengatasi persoalan-persoalan yang tidak dapat dipecahkan saja. Pemerintah tidak suka melibatkan mereka dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan-kebijakan yang dibuat.

Adalah suatu keharusan bahwa semua elite politik maupun masyarakat umum memegang teguh etika politik. Hanya para ulama, terutama yang terlibat dalam politik praktis, memiliki tanggung jawab ganda untuk membudayakan etika politik ini, karena kedudukan mereka sangat terkait dengan pembinaan akhlak atau moralitas umat/bangsa. Sementara itu para ulama yang tidak terlibat dalam politik praktis tetap memiliki peran politis dalam bentuk pendidikan politik rakyat, sebagai perwujudan dari peran pencerahan mereka terhadap umat. Peran ini sebenarnya sudah lama dilakukan oleh para ulama, tetapi

belum optimal. Mereka juga bisa melakukan tindakan politik meski dengan jalan non-politik (*political action in the nonpolitical way*), yang dilakukan dalam kerangka melakukan *amr ma'ruf nahi munkar* (mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran). Dengan komitmen pada penegakan etika-moral, mereka bisa menjadi pihak independen dalam melakukan kontrol terhadap pemerintah serta proses dan aktivitas politik yang berlangsung.⁸

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode ini adalah suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis yang dihasilkan dari data-data lisan dan perilaku yang dapat diamati.⁹ Berdasarkan metodenya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek sesuai dengan apa adanya.¹⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tentang posisi ulama dalam pemerintahan kota Padangsidimpuan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan penelitian terhadap posisi ulama dalam perjalanan pemerintahan di Kota Padangsidimpuan Dalam bidang keagamaan berjalan sebagaimana biasanya, kegiatan rutin seperti peringatan PHBI (Peringatan Hari Besar Islam), kegiatan seremonial seperti Safari Ramadhan tetap terlaksana, hanya saja untuk kegiatan lainnya seperti untuk pemberantasan buta huruf al-Qur'an kurang mendapat perhatian. Tentang upaya untuk mensejahterakan rakyat menurut H.Amsir Saleh Siregar ulama di kota Padangsidimpuan juga kurang. Tentang pendidikan pula Padangsidimpuan merupakan kota pendidikan hanya saja belum ada upaya untuk perbaikan dalam hal pendidikan juga tempat-tempat kos para pelajar dan mahasiswa belum tersentuh dengan peraturan pemerintah, hal itu kata beliau akan mendatangkan masalah jika tidak ditertibkan, banyak kos-kosan yang bisa terjadi percampuran antara kaum lelaki dan perempuan tanpa ada pengawasan, hal ini akan merusak citra Kota Padangsidimpuan sebagai kota pendidikan.

Kota Padangsidimpuan punya visi sebagai kota yang sehat, maju dan sejahtera. Menurut beberapa ulama di kota Padangsidimpuan visi itu belum terealisasi dengan langkah-langkah nyata, untuk menciptakan masyarakat yang sehat harus didukung prasarana seperti rumah sakit yang representative, sesuai harapan rakyat, tapi kelihatannya belum nampak ada perubahan ke arah yang lebih baik, fasilitas rumah sakit masih seperti dahulu. Kota

⁸ Nanang Tahqiq (ed.), *Politik ...*, hlm: 191.

⁹ Asmadi alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.30.

¹⁰ Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm.157.

yang maju juga belum terlihat, memang ada pembangunan tapi belum menyentuh kepada kepentingan rakyat banyak. Taman-taman yang dibuat, lampu kota yang menghiasi cukup bagus tapi akan lebih bagus jika jalan di dalam kota bisa bagus, gedung-gedung sekolah bisa dibangun dengan lebih baik lagi, mungkin karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota ini kecil sehingga pembangunan kota ini agak lambat.

Jawaban dari para ulama dan juga cendekiawan muslim yang berhasil peneliti wawancarai terhadap pertanyaan diatas bervariasi. Dr.Erawadi, M.Ag menjelaskan tentang peran ulama, katanya mengacu peraturan yang sudah ada maka ulama sudah berperan, seperti peran MUI masih berfungsi sesuai dengan poksinya. Menurut H.Amsir Saleh Siregar, peran ulama terhadap perjalanan pemerintahan di Kota Padangsidimpuan sangat kecil lebih besar peran LSM yang ada di kota ini. Bahkan menurut beliau pemerintah lebih takut kepada LSM daripada terhadap ulama. Walaupun demikian ulama telah banyak menyampaikan saran dan nasehat kepada pemerintah baik langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi boleh jadi kurang berterusan sehingga banyak yang diabaikan. Menurut H. Zulfan Efendi, M.Ag., sebenarnya ulama itu merupakan mitra pemerintah dalam pembangunan hanya saja ulama banyak tidak dilibatkan dalam beberapa hal yang terkait dengan poksi ulama, ulama menurut beliau sebagai partisipasi pasif, MUI saja itu dilibatkan ketika pemerintah ada masalah, idealnya ulama juga diikutsertakan dalam perencanaan pembangunan di kota ini supaya jika ada masalah ulama sudah mengetahui cara penanggulangannya. Hal yang sama disampaikan oleh Anhar, MA., bahwa ulama digandeng oleh pemerintah ketika pemerintah kesulitan dalam mengatasi penyakit social dan penyakit remaja, ulama menjadi mediator dalam hal-hal yang akan memicu konflik keagamaan seperti menghadapi LDII dan lainnya. Pemerintah tidak memposisikan ulama sebagai penasehat non formal. Tentang Perda Syari'at ada akan tetapi tidak memiliki kuku sehingga tidak mencakar, Perda Syari'at tidak punya gigi yang dapat menggigit.

PENUTUP

Dari hasil penelitian, maka peneliti menilai bahwa hubungan pemerintah dan ulama adalah hubungan satu arah saja, belum terlihat hubungan dua arah. Pemerintah menjalankan programnya dan ulama menjalankan programnya sendiri belum terlihat sinergisitas dalam melakukan kegiatan. Karena sifatnya berjalan sendiri-sendiri maka ulama tidak dapat memberikan warna kepada pemerintah sesuai dengan misi dari ulama itu sendiri.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Munir Mulkhan, *Perubahan perilaku politik dan Polarisasi Ummat Islam*, Jakarta: Rajawali pers, 1989.
- Asmadi alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997.
- Nanang Tahqiq (ed), *Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Sri Suyanta, *Pola Hubungan Ulama dan Umara (Kajian Tentang Pasangsurut Peran Ulama Aceh)*, Disertasi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2005.
- Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- S. Sinansari ecip (ed.), *NU Khittah dan Godaan Politik*, Bandung: Mizan, 1994
- Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1992.
- Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral: Menurut Imam Al-Ghazali*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.